



**SEKRETRAIAT
DAERAH**



RENCANA KERJA 2025

Rencana kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Natuna

☎ +123 456 7890 🌐 www.setda.natunakab.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman penting bagi setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini disusun berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui dokumen ini, kami berharap dapat menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran, serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah. Dengan demikian, setiap rencana dan program yang diusulkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dalam penyusunannya, kami telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi terkait dan masyarakat, untuk memastikan bahwa semua aspirasi dan kebutuhan terakomodasi dengan baik. Hal ini penting untuk menciptakan keterpaduan dan sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2025.

Akhir kata, kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan Rencana Kerja ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah, serta mencapai visi dan misi Kabupaten Natuna yang unggul dan sejahtera.

29 Juli 2024

Sekretaris Daerah,

BOY WIJANARKO VARIANTO, S.E.
NIP. 19770809 200212 1005

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Sebelum penetapan Renja setiap Perangkat Daerah harus menyusun ranwal dan rancangan Renja. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 16, pasal 126 dan pasal 131 menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan sesuai dengan tahapan.

Diantara tahapan penyusunan dokumen Renja yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah adalah : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan Renja berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat

Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari periode RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2022-2026.

RENJA Sekretariat Daerah Kabupate Natuna Tahun 2025 akan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 yang mengusung tema *“Pemantapan Pembangunan Ekonomi Maritim Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Natuna Yang Unggul dan Sejahtera”*. Selain itu dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 memperhatikan isu strategis Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 yaitu : 1) Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi dan aspek Kebijakan, pengawasan dan proses evaluasi, 2).Kurangnya peahaman OPD dalam pelaksanaan delapan area perubahan, 3).Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman OPD terkait laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
- 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Darah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);

17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

18) Peraturan Bupati Natuna nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud RENJA Sekretariat Daerah disusun sebagai pedoman dan arah bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode satu tahun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Natuna dan berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah.

Adapun tujuan RENJA ini adalah disusun agar tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 dapat dicapai.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian

Renstra Sekretariat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB 2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja Pembangunan Daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing masing unit kerja dan atau laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun berkenaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah meliputi seluruh program dan kegiatan menyangkut realisasi capaian target kinerja kelauran keiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah 2022-2026.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2023

Evaluasi capaian kinerja 2023 dilakukan dengan maskud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil , kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana Pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbikan pelaksanaan rencana Pembangunan dimasa akan datang. Berdasarkan hasil evaluasi capaian IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 berdsarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026 , dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Program Tahun 2023

Program	Indikator	Target	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelembagaan	65	75
	Nilai Laporan LKJIP	78.52	58.1
	Persentase Pelayanan Kedinasan kepala Daerah	100	100
	Persentase Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	85	85
Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Pengelolaan Barang dan Jasa	53	63
	Persentase Realiasi Pelaksanaan Pembangunan	90	90.89
	Tingkat Inflasi Daerah	3.13	NA
Program Pemerintah dan Kesejahteraan	Persentase Pemenuhan Koordinasian Bidang Keagamaan	90	75
	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA	65	95
	Indeks Kualitas Kebijakan	81	38.54
	Persentase Kerjasama yang ditindak lanjuti	90	70
	Peningkatan Nilai LPPD	3.03	2.09

Dalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023, terdapat tiga (3) program dengan dua belas (12) indikator program. Dari dua belas indikator program enam diantaranya mencapai target, dan enam indikator lainnya belum mencapai target (lihat table 1).

Tabel 2. Capaian Indikator Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Indikator	Target 2023	Capaian
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evluasi Kinerja PD	persentase realisasi kinerja perangkat daerah	85	84
2	Kegiatan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan waktu pembayaran administrasi keuangan perangkat daerah	1	1
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	45	100
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Persentase peningkatan BMD	80	80
6	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	100	75
7	Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarna prasarana	70	75
8	Administrasi Keuangan dan Operasional KDH-WKDH	Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan dan operasional KDH-WKDH yang sesuai dengan kebutuhan	100	75
9	Kegiatan Penataan Organisasi	persentase perangkat daerah yang tata kelola baik	100	100
		persentase perangkat daerah yang tata laksana baik	100	100

10	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Agenda Protokoler terencana yang difasilitasi	85	80
11	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat	100	100
12	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Yang Diundangkan	81	71
13	Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama yang di sepakati	90	100
14	Kegiatan Tata Pemerintahan	Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	33
15	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Perekonomian	55	50
16	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	55	52
17	Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	93.7
18	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3.6	53.74
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	14	58.98

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis , disajikan pada table sebagai berikut :

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

SASARAN	INDIKATOR	Target Resntra					Realisasi		Proyeksi Capaian	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya pembinaan TPQ/TPA/MDA di Daerah	Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA	56%	59%	62%	65%	68%	94.82%	96.16%	95%	98%
Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Daerah	78	79.5	80	80	80	73.84	73.98	78	80
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai EPPD dalam LPPD	2.6	3.3	3.34	3.34	3.34	3.31	2.09	3.1	3.3
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	3.46	3.47	3.48	3.49	3.5	4.16	3.71	3.75	3.8

Realisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan memperhitungkan sebagai berikut :

a. Realisasi Indikator Persentase Pembinaan TPQ/TPA/MDA

Realisasi diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan bantuan dana pembinaan dan operasional oleh Pemerintah Daerah pada rumah ibadah dan TPQ/TPA/MDA. Metode pengukuran kinerja yaitu melalui formulasi perbandingan rumah ibadah atau TPQ/TPA/MDA yang aktif dan memiliki kepengurusan serta mendapatkan bantuan pembinaan dan dana operasional dengan jumlah rumah ibadah TPQ/TPA/MDA yang ada di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan data tahun 2022 jumlah rumah ibadah 285 mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 311 rumah ibadah (masjid, gereja, surau). Kenaikan peningkatan jumlah rumah ibadah mencapai 9%. Sementara jumlah TPQ/TPA/MDA justru mengalami penurunan 154 di tahun 2022 menurun di tahun 2023 menjadi 138 TPQ/TPA/MDA menurun sekitar 10.4%.

b. Nilai SAKIP Daerah

Target 76.15 realisasi 73.98 belum mencapai target. SAKIP dinilai dari 4 Komponen, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi Akuntabilitas kinerja. Target belum tercapai disebabkan permasalahan dan kendala sebagaimana yang menjadi rekomendasi dari MENPANRB yaitu :

1. Dokumen perencanaan yang belum berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat dan indikator kinerja yang belum memenuhi

2. Kualitas penetapan kinerja belum sempurna khususnya dalam memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif setiap tahun dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik.
3. Belum memanfaatkan secara optimal tool E-Kejap dalam memantau capaian kinerja serta tingkat kepatuhan pengisiannya masih rendah sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan pengukuran kinerja secara real time
4. Belum memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai alat pertimbangan dalam penentuan strategi dan target kinerja kedepan.
5. Kualitas laporan kinerja yang belum sempurna baik itu pada laporan kinerja tingkat pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah.
6. Belum memanfaatkan informasi kinerja dalam LAKIP Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas.

Tindak lanjut atas permasalahan dan kendala diatas dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja realisasi indikator adalah mengkoordinasikan bersama satkeholder dan jajaran pimpinan sekretariat daerah terkait rekomendasi evaluasi SAKIP. Kemudian menyusun langkah strategis pelaksanaan rekomendasi sesuai tanggungjawab dan wewenang unit kerja. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut, dan mereview hasil pelaksanaan kinerja apakah sudah sesuai rencana atau masih ada kendala.

c. Nilai EPPD

Realisasi indikator EPPD tahun 2023 diperoleh berdasarkan hasil penilaian evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Natuna tahun 2020. Metode evaluasi terhadap LPPD dilakukan dengan menilai dua variable yaitu Indeks Capaian Kinerja (ICK) dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM). Target EPPD tahun 2023 adalah kategori sangat tinggi (skala 3-4). Berdasarkan hasil evaluasi penilaian diperoleh nilai indeks EPPD adalah 2,09. Berdasarkan pengelompokan prestasi capaian kinerja, maka dengan hasil indeks tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna masuk kategori berprestasi sedang (skala 1-2) dan belum tercapai target.

Faktor penghambat dalam pencapaian nilai EPPD adalah sebagai berikut :

- Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan laporan lainnya menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampi memenuhi kualitas yang seharusnya;
- Adanya data Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.
- Adanya perubahan regulasi terkait pedoman penyusunan LPPD yang diterbitkan pada saat penyusunan LPPD sudah dilakukan sehingga perlu revisi atau penyesuaian ulang mengikuti format yang diminta.
- Adanya perbedaan petunjuk teknis pedoman penyusunan LPPD dan kertas Kerja Evaluator sehingga PD sulit menentukan data mana yang dipakai;

- Adanya perbedaan pemahaman antara tim daerah dan tim nasional dalam membaca IKK sehingga tidak ada kepastian dokumen pendukung yang akan dibena;
- Capaian kinerja yang disandingkan dengan daerah lain di seluruh Indoensia sehingga peningkatan capaian kinerja yang terjadi belum tentu meningkatkan skor karena daerah lain peningkatannya lebih tinggi.

d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Nilai ini diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna. Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 3.47 tercapai 3.71. Capaian nilai tersebut menunjukkan kinerja pelayanan masuk kategori baik dengan capaian 106, %.

Faktor Pendukung atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan public sesuai dengan standar pelayanan publik;
- Komitmen dari stakeholder dan ASN dalam memberikan pelayanan public yang prima;
- Adanya dukungan sumberdaya anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daeah

Dengan memepertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah, telaahan

terhadap visi misi Kepala Daerah Kabupaten Natuna, maka diperoleh isu-isu penting dalam perencanaan Pembangunan di Kabupaten Natuna yaitu :

a) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah masih belum optimal dan perlu mendapat perhatian serius, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi public atas hasil Pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/ asset pemerintah daerah, kurang nya kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, kurang intensnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, kurang optimalnya penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang-undangan, dan pengadaan barang dan jasa.

b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Kabupaten Natuna diantaranya dilaksanakan melalui pembinaan mental keagamaan. Pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan diarahkan kepada pemahaman dan implementasi terhadap nilai nilai agama yang terwujud dalam perilaku bermoral.

c) Sinergitas dan koordinasi perumusn kebijakan kesejahteraan Masyarakat dan sosial

Kesejahteraan Masyarakat tidak terlepas dari isu kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan ditandai dengan naiknya angka kemiskinan Kabupaten Natuna. Pengangguran di Kabupaten Natuna mengalami sedikit penurunan. Angka kemiskinan dan Pengangguran yang ada menyebabkan pemerataan kesejahteraan / distribusi pendapatan dan ketimpangan cukup tinggi, hal ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan sinergitas perumusan kebijakan dalam penanganan dan peningkatan masalah kesejahteraan sosial.

- d) Sinergitas dan koordinasi perumusan penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada potensi sumber daya lokal

Isu penguatan perekonomian Masyarakat berbasis pada peningkatan potensi sumber daya lokal menjadi hal yang paling penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Penguatan potensi ini dilakukan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah agar mampu bertahan dan bertumbuh sebagai penopang perekonomian daerah.

Belum optimalnya perumusan kebijakan penguatan perekonomian menjadi salah satu factor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dibandingkan Kabupaten lain yang ada di Propinsi Kepulauan Riau.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna adalah meningkatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, meningkatkan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan kebijakan pelayanan publik dan meningkatkan kebijakan bina mental spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Rancangan Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah berdasarkan kondisi di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada table lampiran.

2.4. Penelaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat

Dalam proses pembangunan daerah diperlukan partisipatif dari masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan. Proses partisipatif ini dilakukan dalam bentuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan (msrenbang) ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Dalam pelaksanaan proses Musrenbang di tingkat Kecamatan, terdapat beberapa usulan kegiatan dari Masyarakat/desa ke Sekretariat Daerah

diantara ditujukan ke Bagian Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Tata Pemerintahan. Untuk lebih jelas disajikan pada table dibawah ini.

Tabel 4. Usulan Program dan kegiatan Dari Masyarakat

No	Program/Kegiatan			Indikator Kinerja	Lokasi	Volume	Catatan
I	Pokok Pokok Pikiran DPRD						
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesjehteraan Rakyat						
	1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual		Pengadaan Karpet Rumah Ibadah	Masjid Al Huda Desa Cemaga Selatan	1 Paket	Pokir DPRD / Diteruskan ke RKPD
				Pengadaan Karpet Rumah Ibadah	Masjid An Nur Desa Cemaga Selatan	1 Paket	Pokir DPRD / Diteruskan ke RKPD
II	Aspirasi Masyarakat (Musrenbang)						
A	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan Kesjehteraan Rakyat						
	1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual		Pengadaan Alquran untuk TPQ dan rumah Quran	Desa Kelanga	1 Paket	Usulan Kecamatan
2	Kegiata Administrasi Tata Pemerinahan						
	2.1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan		Peningkatan Kesejahteraan Kader Posyandu Kelurahan dengan Pemberian Insentif sebesar Rp. 350.000,-/bulan	Kelurahan Ranai	Paket	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai tupoksi Bagian Tapem
	2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administarsi Kewilayahan		Honor Kader Posyandu (Kader Posyandu Beringin Dan Bunda Pertiwi)	Kelurahan Ranai Dara	Paket	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai tupoksi Bagian Tapem
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Pengadaan Panggung Tenda	Desa Kelanga	Unit	Usulan Kecamatan/ditolak tidak sesuai kewenangan bagian umum

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kualitas rencana Pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antara pusat, provinsi dan Kabupaten serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan Pembangunan daerah.

Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan setiap misi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Lebih lanjut, sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam dokumen Renstra juga harus sinergis mendukung pencapaian sasaran pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, sinergi perencanaan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan satu tahun. Berikut ini adalah keterhubungan dan keselarasan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi.

Tabel 5. Keselarasan Sasaran Renstra Kemendagri, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024	Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepri 2021-2026	Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026
S.7. Meningkatnya tata Kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, professional dan inovatif	S.2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	S.2. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah S.3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
S.10. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	T.2. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, kuat dan antisipatif	T.2. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

3.2. Telaahan Terhadap RKPD Kabupaten Natuna 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2025 berfokus pada tiga hal yaitu :

- 1) Pembangunan ekonomi daerah. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah perumusan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Selain itu juga mengkoordinasi perangkat daerah terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perekonomian daerah
- 2) Penguatan tata kelola pemerintahan. Keterkaitan dengan fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang penuh dan tanggungjawab dalam menjamin terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik. Merumuskan kebijakan upaya peningkatan kinerja, serta kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) dan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Keterkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yaitu perumusan kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan SDM melalui peningkatan bina mental Masyarakat, menjalin Kerjasama dalam upaya peningkatan kualitas SDM pegawai dan Masyarakat.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif mendukung mewujudkan misi 1. **Akselerasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia** dengan sasaran Meningkatnya

pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yakni. Dan misi 6 ***Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas*** dengan sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Demi terwujudnya visi misi Kabupaten Natuna RPJMD tahun 2021-2026 serta untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan perencanaan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna menetapkan 2 (dua) tujuan yang merupakan turunan dari sasaran misi pada RPJMD seperti yang terlihat pada gambar 1 (satu).

Tabel 1. Tujuan Resntra Sekretariat Daerah



Tujuan Pertama (T.1) yaitu Meningkatnya pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. Tujuan ini mendukung visi misi Kepala Daerah, misi pertama (1) *Akselarasai peningkatan kualitas sumber daya manusia*. Tujuan pertama (T.1) Sekretariat Daerah ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang religius dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral dan budaya dalam kehidupan masyarakat. Sasaran (S.1) yang ingin dicapai pada Tujuan ini adalah

Meningkatnya pembinaan terhadap Lembaga keagamaan (TPQ/TPA/MDA) di Daerah .

Tujuan kedua (T.2) yaitu Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Tujuan ini mendukung visi misi Kepala Daerah pada misi enam (6) Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun sasaran (S.2) yang ingin dicapai dari tujuan (2) Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah yaitu Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan transparan. Yang menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran ini diukur dari tiga indikator yakni : 1). Dinilai dari nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 2). Dinilai dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam LPPD, 3). Dinilai dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 1. Tujuan Sasaran dan Indikator Rencana Kerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatnya pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan pembinaan terhadap Lembaga keagamaan (TPQ/TPA/MDA) di Daerah	1. Persentase Pembinaan Lembaga Keagamaan (TPQ/TPA/MDA)	95%
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah	1. Nilai SAKIP 2. Nilai LPPD 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80 3.34 3.80

indikator sasaran mengalami perubahan target seperti indikator 1 dari 65% menjadi 95%. Hal ini disebabkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian pada tahun 2022-2023 yang mencapai diatas target, sehingga dengan kondisi eksisting kinerja yang cukup bagus maka diperlukan perubahan target menyesuaikan hasil capaian kinerja sebelumnya. Kemudian indikator yang

juga mengalami perubahan target adalah indikator (4) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 3.49 target berubah menjadi 3.80. Hal ini juga sama dengan indikator sebelumnya bahwa hasil capaian tahun sebelumnya sudah melebihi target sehingga diperlukan penyesuaian target berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya. Untuk lebih jelas terkait perubahan target dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator	Target 2025 sebelum perubahan	Target 2025 setelah perubahan
Persentase Pembinaan Lembaga Keagamaan (TPQ/TPA/MDA)	65%	95%
Nilai SAKIP Kabupaten	80	80
Nilai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.34	3.34
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3.49	3.80

3.3. Kebijakan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan kebijakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Sesuai dengan arah Pembangunan RKPD tahun 2025, maka pada tahun 2025 arah kebijakan program kegiatan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, yaitu melalui upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pelayanan yang berbasis digital, transparansi pengelolaan keuangan, peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran dll.

Diantara bentuk strategi nya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik bagi entitas yang memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat. Kemudian peningkatan kualitas kebijakan (indeks kualitas kebijakan), peningkatan tatalaksana kelembagaan (indeks kelembagaan), optimalisasi aplikasi SISMONKAB dalam pengendalian dan evaluasi Pembangunan, Peningkatan pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (indeks PBJ), Peningkatan layanan administrasi kepegawaian.

2. Peningkatan Ekonomi Daerah, yaitu melalui optimalisasi kebijakan perekonomian dan Pembangunan yang berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Mendorong penyerapan anggaran APBD seoptimal mungkin dalam bentuk percepatan belanja daerah fisik maupun non fisik. Meretorasi manajemen BUMD sehingga bisa bertumbuh dan memberikan profit bagi daerah, dan pengendalian inflasi melalui pegelaran pasar murah, memperluas pasar produk UMKM lokal melalui kebijakan Kerjasama antar daerah dan pihak swasta.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia, ada dua yang menjadi sasaran yaitu SDM Pemuda sebagai asset daerah dan SDM Kepegawaian. SDM Kepemudaan melalui peningkatan penddidikan iman dan taqwa serta Pendidikan tinggi. strateginya yang akan ditempuh untuk

peningkatan kualitas SDM yaitu penguatan IMTAQ kalangan remaja melalui kegiatan Bina Mental Spritual. Kemudian beasiswa bagi anak-anak daerah untuk bisa menempuh Pendidikan tinggi di Universitas melalui program Kerjasama daerah dengan Institusi Pendidikan, Sementara SDM kepegawaian melalui peningkatan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan diklat fungsional, bimbingan teknis sesuai kebutuhan yang strategis.

Berikut adalah target kinerja program Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 6. Indikator Sasaran Program Sekretariat Daerah

Program	Sasaran Program	Indikator	Target 2025
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya penyelenggaraan Kebijakan Pembinaan Mental Spritual	Persentase Peningkatan Pembinaan TPQ/TPA/MDA	96%
	Meingkatkan Penyelenggaraan Kebijakan Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah yang terpenuhi Indikator LPPD	100%
		Indeks Kualitas Kebijakan	70
		Kerjasama yang ditindaklanjuti	90%
Program Perekonomian dan pembangunan	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan dan kebijakan Perekonomian	Nilai Indeks PBJ	78
		Realisasi Pelaksanaan Pembangunan	90%
		Tingkat Inflasi Daerah	2.85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Kelembagaan	70
		Nilai LAKIP Sekretariat Daerah	77
	Meningkatnya layanan administrasi kesekretariatan dan layanan pimpinan	Layanan Dukungan Administrasi Kesekretariatan yang sesuai SOP	90%
		Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Daerah	100%

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja Program

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan berserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu diantaranya :

- 1) Mempedomani RKPD Kabupaten Natuna Tahun 2025 serta Resntra Sekretariat Daerah 2022-2026.
- 2) Mendukung pencapaian Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Natuna. Secara umum Sekretariat Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi.
- 3) Keserasian dan keterpaduan Pembangunan baik perencanaan Pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka Pembangunan daerah.
- 4) Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan Pembangunan daerah
- 5) Program dan Kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu isu strategis Sekretariat Daerah
- 6) Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efiseinsi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah 3 program dan 18 kegiatan dan 45 Sub kegiatan
2. Jumlah total kebutuhan dana / pagu indikatif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja tahun 2025 adalah sebesar Rp. **65,162,892,798** yang bersumber dari APBD Kabupaten. Adapun rekapitulasi program kegiatan dan pendanaan tahun 2023 disajikan dalam tabel pada lampiran.

Matrik Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten
Natuna

KODE	URUSAN DAN URUSAN PEMERINTAH DAN KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDUKTOR KINERJA				PREDIKSI INDIKATOR	PERAKHIRAN MASA	JANGKA PROYEKSI	PERAKHIRAN TAHUN
					PROGRAM/OUTPUT/OUTCOME		KEGIATAN SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
25	Sekretariat Daerah								7.087.875.808	7.828.268.945		
25.00	Sekretariat Daerah Kabupaten								7.087.875.808	7.828.268.945		
4	UMUM PERSEKUTUAN UMUM PEMERINTAHAN								7.087.875.808	7.828.268.945		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								7.087.875.808	7.828.268.945		
4.01.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESUKSESAN KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengabdian masyarakat di dalam kabupaten Natuna		PERSENTASE PERMINTAAN KECERDASAN SREDAK KECERDASAN	3			1.787.505.825	1.787.505.825		
4.01.02.3.03	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	1.787.505.825	1.787.505.825		
4.01.02.3.03.03	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Khususnya: Kesejahteraan Sosial						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 1 Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urutan Sosial Transmigrasi, Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pertumbuhan dan KB	1	1.787.505.825	1.787.505.825		Sekretariat Daerah
	Berikut ini yang di berikan kepada pihak ketiga (PSKKU)			Kabupaten Natuna				2	980.000.808	808.000.080		
	Kegiatan dan Operasional Kantor Pusat			Kecamatan Bunguran Timur				1	980.074.828	808.074.828		
	Kegiatan Safari Ramadhan Pemkab			Kabupaten Natuna				1	240.431.808	248.431.080		
	Pengadaan AC			Kecamatan Bunguran Timur				2	22.885.808	22.885.080		
	Pengadaan Genset Darurat			Kecamatan Bunguran Timur				1	5.000.808	8.800.080		
	Pengadaan Kapal Angin Kencana			Kecamatan Bunguran Timur				2	21.000.808	21.800.080		
	Pengadaan Mesin Poking Rumpul			Kecamatan Bunguran Timur				1	5.000.808	8.800.080		
	Pengadaan Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	5.000.808	8.800.080		
	Pengadaan Tiang			Kecamatan Bunguran Timur				1	7.000.808	7.800.080		
4.01.00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESUKSESAN KEGIATAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya pengabdian masyarakat di dalam kabupaten Natuna		PERSENTASE PERMINTAAN KECERDASAN SREDAK KECERDASAN	3			8.270.176.208	8.270.768.210		
4.01.02.3.03	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	80.000.808	0		

PERDUECAT CUBRAH. SIKNE TETAY CUBAHO.

[illegible]

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/SIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
05	Sekretariat Daerah								1,841,750,000	1,819,750,000		
05.05	<u>BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</u>								1,841,750,000	1,819,750,000		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,841,750,000	1,819,750,000		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1,841,750,000	1,819,750,000		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		NILAI LAPORAN LKJIP	78.65			413,000,000	391,000,000		
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	90	413,000,000	391,000,000		
4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	335,000,000	335,000,000		Sekretariat Daerah
	Pengadaan Komputer PC			Kecamatan Bunguran Timur				1	35,000,000	35,000,000		
	Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				2	300,000,000	300,000,000		
4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	3	78,000,000	56,000,000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAU/INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Capaian Kinerja dan Indeks Realisasi Kinerja SKPD					
	Belanja Model Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25.000.000	0		
	Belanja Model Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	8.000.000	6.000.000		
	Pengkoordinasian Pelaksanaan evaluasi kinerja dan analisis kinerja Sekretariat Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	95.000.000	90.000.000		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Efektifitas yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE REALISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	90			1.428.750.000	1.428.750.000		
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	90	1.428.750.000	1.428.750.000		
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1	829.000.000	829.000.000		Sekretariat Daerah
	Belanja Model Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				3	17.000.000	17.000.000		
	Belanja Model Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				3	12.000.000	12.000.000		
	Pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan Daerah			Kabupaten Natuna				1	808.000.000	800.000.000		
4.01.03.2.02.05	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12	798.750.000	798.750.000		Sekretariat Daerah
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				1	25.000.000	25.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PADU INDIKATIF	FRAK RAH MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
05	Sekretariat Daerah								840.000.000	741.789.758		
03 04	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM								840.000.000	741.789.758		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								840.000.000	741.789.758		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								840.000.000	741.789.758		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Efisiensi yang Bersih dan Akuntabel		TINGKAT INFLASI DAERAH	2,94			840.000.000	741.789.758		
4.01.03.201	Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan						Persentase Kebijakan Perekonomian	45	565.000.000	506.193.172		
4.01.03.201.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	245.000.000	270.595.586		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	15.000.000	15.000.000		
	Belanja Modal Smart TV Display			Kecamatan Bunguran Timur				1	20.000.000	20.000.000		
	Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Kabupaten Nabun				1	210.000.000	235.595.586		
4.01.03.201.03	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian	2	320.000.000	235.595.586		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN)	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PENGANGKUTAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEO	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Distribusi Perekonomian					
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Kabupaten Natuna				1	320.000.000	235.596.586		
4.01.05.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						Persentase Pendistribusian Kebijakan Sumber Daya Alam yang Tepat Sasaran	65	275.000.000	235.596.586		
4.01.05.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						Jumlah: Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Usaha Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan	1	275.000.000	235.596.586		Sekretariat Daerah
	Pengkoordinasian dan Pewilayasan pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Usaha Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			Kabupaten Natuna				1	275.000.000	235.596.586		
Jumlah									840.000.000	741.789.768		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				RAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03	Sekretariat Daerah								751.000.000	724.000.000		
03.03	<u>BIDANG HUKUM</u>								751.000.000	724.000.000		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								751.000.000	724.000.000		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								751.000.000	724.000.000		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN	86			751.000.000	724.000.000		
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						Persentase Produk hukum yang di undangkan	74	751.000.000	724.000.000		
4.01.02.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	548	357.000.000	350.000.000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	7.000.000	0		
	Perumusan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan lainnya			Kabupaten Nabuna				508	350.000.000	350.000.000		
4.01.02.2.03.02.	Fasilitasi Bantuan Hukum						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3	250.000.000	250.000.000		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi Pelayanan bantuan hukum, Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Hukum			Kabupaten Nabuna				2	250.000.000	250.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PACU INDIKATIF	PRAKERJAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	435	144.000.000	124.000.000		Sekretariat Daerah
	Barang Modal Laptop			Kabupaten Natuna				1	40.000.000	20.000.000		
	Barang Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				1	4.000.000	4.000.000		
	Melakukan dokumentasi dan publikasi produk hukum daerah			Kecamatan Bunguran Timur				400	100.000.000	100.000.000		
JUMLAH									751.000.000	724.000.000		

KODE	URUSAN/IBD/URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PADU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PRODUK KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03	Bekretariat Daerah								572.001,000	572.000,635		
0310	<u>BAGIAN KERJASAMA</u>								572.001,000	572.000,635		
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								572.001,000	572.000,635		
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH								572.001,000	572.000,635		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE KERJASAMA YANG DITINDOKLANJUTI	90			572.001,000	572.000,635		
4.01.02.2.04.	Fasilitas Kerja Sama Daerah						Persentase Kerjasama Yang Disepakati	90	572.001,000	572.000,635		
4.01.02.2.04.01.	Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	12	374.217,651	457.600,581		Sekretariat Daerah
	Fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Fasilitas kerja sama dalam negeri			Kabupaten Natuna				10	374.217,651	457.600,581		
4.01.02.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1	197.763,349	114.400,054		Sekretariat Daerah
	Pemeriksaan dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri			Kabupaten Natuna				1	197.763,349	114.400,054		
JUMLAH									572.001,000	572.000,635		

KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAOU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEO	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
02	Sekretariat Daerah								1.167.481.600	1.223.924.888		
02.03	<u>BAGIAN ORGANISASI</u>								1.167.481.600	1.223.924.888		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1.167.481.600	1.223.924.888		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1.167.481.600	1.223.924.888		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDIKS KELEMBAGAAN	70			1.167.481.600	1.223.924.888		
4.01.01.213	Pemetaan Organisasi						Persentase Perangkat Daerah yang tata kelolanya baik	100	770.181.600	775.903.244		
4.01.01.213.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	384.073.182	489.434.004		Sekretariat Daerah
	Pengkoordinasian Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Kabupaten Natuna				47	384.073.182	489.434.004		
4.01.01.213.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1	235.000.800	215.300.822		Sekretariat Daerah
	Belanja Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25.000.800	0		
	Belanja Modul Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				1	20.000.800	0		

KODE	URUSAN/ISU DAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PADU INDIKATIF	PRAKARAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan laptop			Kabupaten Matuna				2	40.000.000	40.000.000		
	Pengkoordinasian Pelaksanaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Sektoras			Kabupaten Matuna				37	150.000.000	175.300.822		
4.01.01.215.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1	151.100.418	151.100.418		Sekretariat Daerah
	Pengkoordinasian Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			Kabupaten Matuna				47	151.100.418	151.100.418		
4.01.01.215.	Pemetaan Organisasi						Pemetaan Perangkat Daerah Yang Tata Laksananya Berk	100	387.300.000	448.621.044		
4.01.01.215.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi/ Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	247.300.000	272.683.822		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kabupaten Matuna				72	247.300.000	272.683.822		
4.01.01.215.04	Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1	150.000.000	175.350.822		Sekretariat Daerah
	Pelaksanaan Pengendalian dan evaluasi Kinerja Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Kabupaten Matuna				45	150.000.000	175.350.822		
Jumlah									1.167.461.606	1.223.924.998		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	PRIORITAS DAERAH	SASARAN Pembangunan	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAU/INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
03	Sekretariat Daerah								983.000.000	1.728.000.000		
03.09	<u>BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</u>								983.000.000	1.728.000.000		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								983.000.000	1.728.000.000		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								983.000.000	1.728.000.000		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		INDEKS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA	59			983.000.000	1.728.000.000		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	3,7	521.000.000	1.293.000.000		
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12	121.000.000	93.000.000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Airt Pendingin (AC)			Kecamatan Bunguran Timur				2	16.000.000	8.000.000		
	Belanja Modal Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	20.000.000	20.000.000		
	Belanja Modal Komputer PC All in One			Kecamatan Bunguran Timur				3	60.000.000	60.000.000		
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				5	25.000.000	5.000.000		
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Orang yang Mengikuti	30	400.000.000	1.293.000.000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Kabupaten Natuna				50	400,000,000	400,000,000		
	Pelaksanaan Bimtek PSJ			Kabupaten Natuna				50	0	400,000,000		
	Pelaksanaan Bimtek PSJ			Kabupaten Natuna				50	0	400,000,000		
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	16	462,000,000	435,000,000		
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4	462,000,000	435,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Komputer			Kecamatan Bunguran Timur				2	40,000,000	20,000,000		
	Belanja Modal Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				1	12,000,000	10,000,000		
	Belanja Modal Printer			Kecamatan Bunguran Timur				2	10,000,000	5,000,000		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Kabupaten Natuna				4	400,000,000	400,000,000		
JUMLAH									963,000,000	1,728,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PADU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KED	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
05	Sekretariat Daerah								1,745,000,000	16,517,083,954		
03.08	<u>BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI/PIMPINAN</u>								1,745,000,000	16,517,083,954		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	100			1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.01.214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						Persentase Agenda Protokol Terencana yang terfasilitasi	88	1,745,000,000	16,517,083,954		
4.01.01.214.01	Fasilitasi Keprotokolan						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	1,880,000,000	6,957,627,675		Sekretariat Daerah
	Belanja Modal Laptop			Kabupaten Nabuna				12	50,000,000	1,361,525,535		
	Belanja Modal Printer			Kabupaten Nabuna				12	80,000,000	1,361,525,535		
	Belanja Souvenir			Kabupaten Nabuna				12	200,000,000	1,361,525,535		
	Pakaian Dinas Lapangan			Kabupaten Nabuna				12	200,000,000	1,361,525,535		
	Renovasi Ruang Kantor			Kabupaten Nabuna				12	500,000,000	1,361,525,535		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Rewasi Ruang Kantor			Kabupaten Naduna				12	150.000.000	150.000.000		
4.01.01.214.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	220.000.000	1.626.845.636		Sekretariat Daerah
	Belanja Alat Perekam dan Headphone			Kabupaten Naduna				12	100.000.000	407.211.459		
	Belanja laptop			Kabupaten Naduna				12	50.000.000	407.211.459		
	Belanja Modul Komputer			Kabupaten Naduna				12	40.000.000	407.211.459		
	Belanja printer			Kabupaten Naduna				12	30.000.000	407.211.459		
4.01.01.214.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	345.000.000	7.930.610.443		Sekretariat Daerah
	Belanja HP phone			Kabupaten Naduna				12	25.000.000	1.132.944.349		
	Belanja Hp OPPO			Kabupaten Naduna				12	20.000.000	1.132.944.349		
	Belanja Kamera			Kabupaten Naduna				12	80.000.000	1.132.944.349		
	Belanja Lensa Kamera			Kabupaten Naduna				12	55.000.000	1.132.944.349		
	Belanja Modul Laptop			Kabupaten Naduna				12	75.000.000	1.132.944.349		
	Belanja Printer			Kabupaten Naduna				12	30.000.000	1.132.944.349		
	Belanja TV Smart			Kabupaten Naduna				12	60.000.000	1.132.944.349		
Jumlah									1.745.000.000	16.617.863.964		

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PADU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
05	Sekretariat Daerah								48.665.650,462	51.355,473,122		
05.07	BAGIAN UMUM								48.665.650,462	51.355,473,122		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								48.665.650,462	51.355,473,122		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								48.665.650,462	51.355,473,122		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP	90			48.665.650,462	51.355,473,122		
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	19.669.441,893	24,325,148,587		
4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150	19.669.441,893	24,325,148,587		Sekretariat Daerah
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bunguran Timur				150	19.669.441,893	24,325,148,587		
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase peningkatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	55	147.009,364	142,588,999		
4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas berserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8	147.009,364	142,588,999		Sekretariat Daerah
	Belanja Pakan Adat Daerah KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				36	5.535,000	7,588,000		
	Belanja Pakan Batak Tradisional KDH WKDH SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				3	4.000,000	7,588,000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM KEGIATAN/ISU KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKTOR KINERJA				RACUN INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROSES KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) KDH/KMDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				8	10.800.000	7.800.000		
	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) KDH/KMDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				2	9.600.000	7.800.000		
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) KDH/KMDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				5	10.000.000	7.500.000		
	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Lengan Panjang			Kecamatan Bunguran Timur				8	11.000.000	7.800.000		
	Belanja Pakaian Sipil Lengkap KDH/KMDH/SEKDA			Kecamatan Bunguran Timur				3	14.400.000	7.900.000		
	Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Kecamatan Bunguran Timur				8	81.174.384	60.000.000		
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase penyediaan sarana administrasi umum pemerintahan	76	6.393.716.179	6.057.164.249		
4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	730.000.000	725.000.000		Sekretariat Daerah
	Belanja alat bahan komponen listrik kabel penerangan bangunan gedung set simetris lampu jalan kantor bucatli			Kecamatan Bunguran Timur				8	305.000.000	300.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Kecamatan Bunguran Timur				12	425.000.000	425.000.000		
4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	447.894.249	292.894.249		Sekretariat Daerah
	Belanja Alat Tulis Kantor			Kecamatan Bunguran Timur				1	180.000.000	100.000.000		
	PENGADAAN PANGGUNG YENDHA DESA KELANDA			Desa Kelanda				2	75.000.000	0		

KODE	URUSAN/SIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PROG INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor			Kabupaten Bakura				5	192.884,349	192.884,349		
4.01.01.2.06.05	Penyediaan Peralatan Rumah Tinggi						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tinggi yang Disediakan	12	860.066,000	80.000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Bahan, Bahan Kebersihan gedung kantor Bupati, gedung smpok, gedung wisma			Kecamatan Bunguran Timur				3	60.000,000	30.000,000		
	Belanja jasa yang dibutuhkan kepada Pihak Ketiga Pihak lain (Jasa Kebersihan)			Kecamatan Bunguran Timur				1	300.000,000	30.000,000		
4.01.01.2.06.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaannya						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	14	478.757,300	198.500,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Cetak Kalender, cetak buku agenda, cetak sertifikat sambutan, Garuda, cetak map/peta, Map Regent, Cetak kemping, cetak buku di apokli, cetak penda mika, cetak foto KDH BKDH			Kecamatan Bunguran Timur				9	478.757,300	198.500,000		
4.01.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	2.958.294,830	2.784.000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja Bimbingan Teknis			Kecamatan Bunguran Timur				10	120.000,000	120.000,000		
	Belanja Makan Minum Rapat			Kecamatan Bunguran Timur				1000	222.000,000	200.000,000		
	Makan Minum Jambuan Sampok dan tamu undangan			Kabupaten Bakura				10	1.461.000,000	1.461.000,000		
	Perjalanan Dinas Dalam Regent (Luar daerah dan Dalam Daerah)			Kabupaten Bakura				301	2.043.294,830	2.000.000,000		
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah						Persentase peningkatan barang milik pemerintah daerah	60	5.348.200,000	5.525.000,000		
4.01.01.2.07.01	Pengadaan kendaraan, Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Unit kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas	4	1.000.000,000	1.000.000,000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/PROGRAM/URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PROJEKSIAN MAJU	JENIS PROGRAM KED	PEMANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTPUT		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Jabatan yang Diserahkan					
	Belanja modal Kendaraan dinas roda empat ASEAN			Kecamatan Bunguran Timur				1	300.000.000	300.000.000		
	Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda Empat KDH/NGON			Kecamatan Bunguran Timur				1	700.000.000	700.000.000		
A.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional kelas Lapangan						Jumlah Unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diserahkan	1	745.000.000	745.000.000		Sekretaris Daerah
	Belanja modal bus mini untuk tamu daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	300.000.000	300.000.000		
	Belanja modal kendaraan dinas roda dua			Kabupaten Natuna				1	20.000.000	20.000.000		
	Belanja Modal/Modul Truck			Kecamatan Bunguran Timur				1	280.000.000	280.000.000		
	Kendaraan dinas operasional Pick Up			Kabupaten Natuna				1	175.000.000	175.000.000		
A.01.01.2.07.03	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Diserahkan	5	607.000.000	600.000.000		Sekretaris Daerah
	Belanja Lemari Arap Besi			Kecamatan Bunguran Timur				7	50.000.000	50.000.000		
	Belanja Modal Kursi rapat			Kecamatan Bunguran Timur				600	375.000.000	50.000.000		
	Partisi Meja Kantor			Kecamatan Bunguran Timur				15	225.000.000	60.000.000		
	Pengadaan Kursi kerja staf			Kecamatan Bunguran Timur				50	175.000.000	60.000.000		
	Pengadaan Kursi Plastik			Kecamatan Bunguran Timur				500	110.000.000	50.000.000		
A.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Meubelanya						Jumlah Unit Peralatan dan Meubelanya yang Diserahkan	5	1.455.500.000	505.000.000		Sekretaris Daerah
	Belanja Modal Alat Pendingin (AC Split)			Kecamatan Bunguran Timur				10	100.000.000	50.000.000		
	Belanja modal alat perekam CCTV			Kecamatan Bunguran Timur				1	50.000.000	50.000.000		
	Belanja modal penghantar lantai			Kecamatan Bunguran Timur				5	35.000.000	35.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PENGABANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAJU INDIKATIF	PRAKRAAN MAJU	JENIS PRGO & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pengadaan Komputer PC ALL IN ONE			Kecamatan Bunguran Timur				10	235.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Kursi Plastik Masjid/Kp. Air Ross			Kelurahan Sersaan				1	100.000.000	100.000.000		
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				10	250.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Laptop			Kecamatan Bunguran Timur				10	250.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Mesin Scanner			Kecamatan Bunguran Timur				10	50.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Printer			Kecamatan Bunguran Timur				10	55.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Tivi Display + Standing Rakat			Kecamatan Bunguran Timur				14	311.500.000	20.000.000		
A 01 01 2 07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5	730.000.000	500.000.000		Sekretariat Daerah
	Belanja modal rampel tenda			Kecamatan Bunguran Timur				1	75.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Pelapang tenda			Kecamatan Bunguran Timur				1	40.000.000	50.000.000		
	Pengadaan rampel dan pelapang Tenda Kersud			Kecamatan Bunguran Timur				4	320.000.000	150.000.000		
	Pengadaan rampel Gedung Kantor Bupati (Non Tiang)			Kecamatan Bunguran Timur				1	40.000.000	50.000.000		
	Pengadaan Rampel Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				2	40.000.000	50.000.000		
	Pengadaan serung kursi			Kecamatan Bunguran Timur				600	100.000.000	50.000.000		
	Pengadaan terpel tenda			Kecamatan Bunguran Timur				1	50.000.000	50.000.000		
	Pengadaan rampel gedung dan Bang Gedung Bn Bndt			Kecamatan Bunguran Timur				2	55.000.000	50.000.000		
A 01 01 2 07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	440.700.000	525.000.000		Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/URIDANO URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKORAN MAJU	JENIS PROG & KSG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dan jasa tagihan listrik dan air			Kabupaten Natuna			2	115,790,000	150,000,000			
	Belanja Sewa Rumah Singgah			Kabupaten Natuna			1	250,000,000	300,000,000			
	Pengadaan Perakitan atau Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Sunguran Timur			1	75,000,000	75,000,000			
A 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan penyediaan sarana penunjang urusan pemerintahan	100	6,254,550,286	6,244,550,286		
A 01 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat, Materi Surat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	120,000,000	110,000,000		Sekretariat Daerah
	Benda pos lainnya			Kecamatan Sunguran Timur				1	55,000,000	55,000,000		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Natuna				12	60,000,000	60,000,000		
A 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	1,925,000,000	1,925,000,000		Sekretariat Daerah
	Belanja telepon			Kecamatan Sunguran Timur				1	55,000,000	55,000,000		
	Tagihan Air			Kecamatan Sunguran Timur				1	170,000,000	172,000,000		
	Tagihan Listrik			Kecamatan Sunguran Timur				1	1,700,000,000	1,700,000,000		
A 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	4,208,550,286	4,208,550,286		Sekretariat Daerah
	Bayar Premi Asuransi Kecelakaan Kerja			Kecamatan Sunguran Timur				1	12,975,200	12,975,200		
	Belanja Jasa Tenaga Kantor Pelayanan Umum			Kecamatan Sunguran Timur				650	772,800,000	772,800,000		
	Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga			Kecamatan Sunguran Timur				1	280,000,000	280,000,000		
	Belanja tenaga pelayanan pelugan rumah singgah Sibahi			Kabupaten Natuna				12	30,000,000	30,000,000		

KODE	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAJAU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Honorarium guru KORPRI/KORPRI Rantai Bekas dan Jakarta			Kabupaten Natuna				72	180.000,000	180.000,000		
	Jasa tenaga administrasi (Tenaga Pendamping pengelolaan aset PPTK, PTT)			Kecamatan Bunguran Timur				1	2.701.280,000	2.701.280,000		
	Pemeriksaan kesehatan			Kecamatan Bunguran Timur				1	15.221,500	15.221,500		
	Pemeriksaan kesehatan			Kecamatan Bunguran Timur				1	215.273,400	215.273,400		
A 01 01 2 05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pembelian pembelian sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintahan	60	6.120.000,000	6.350,000,000		
A 01 01 2 05 02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayar Pajak dan Perawatan	41	4.780.000,000	5.004,000,000		Secretariat Daerah
	Belanja Alat Transportasi Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	5.000,000	5.000,000		
	Belanja Alat Transportasi M/V Induk Perkasa			Kecamatan Bunguran Timur				1	10.000,000	10.000,000		
	Belanja Bahan Bakar dan pelumas			Kabupaten Natuna				1	2.330.000,000	2.330.000,000		
	Belanja Jasa Operator Kapal			Kecamatan Bunguran Timur				120	522.000,000	522.000,000		
	Belanja Biaya pengelolaan Kapal M/V			Kabupaten Natuna				20	204.000,000	210.000,000		
	Belanja pajak, clearance kendaraan dinas dan m/v Induk perkasa			Kabupaten Natuna				1	180.000,000	180.000,000		
	Belanja Paket Pengiriman (Airtel/nyak)			Kecamatan Bunguran Timur				1	37.000,000	37.000,000		
	Belanja Pemeliharaan alat angkutan umum bermotor			Kabupaten Natuna				1	500.000,000	500.000,000		
	Belanja pemeliharaan alat keamanan Kapal M/V			Kabupaten Natuna				1	80.000,000	80.000,000		

KODE	URUSAN/IDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				RAJU INDIKATIF	PEMBANGUNAN MAJU	JPN & PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB-KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja Pemeliharaan peralatan dan Mesin			Kabupaten Natuna				1	300.000.000	300.000.000		
	Belanja suku cadang kendaraan dinas dan MV linir dua Perbaca			Kecamatan Bunguran Timur				1	670.000.000	670.000.000		
4.01.01.2.05.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperbaiki	6	642.100.000	602.100.000		Sekretariat Daerah
	Belanja bahan bakar dan pelumas			Kecamatan Bunguran Timur				1	245.000.000	275.000.000		
	Belanja jasa faktur rekening dan listrik			Kecamatan Bunguran Timur				12	30.000.000	30.000.000		
	Belanja Pemeliharaan mesin peralat			Kecamatan Bunguran Timur				1	100.000.000	100.000.000		
	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Gedung Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				1	90.000.000	90.000.000		
	Isi ulang Gakl UPD 12 kg			Kecamatan Bunguran Timur				100	27.500.000	27.500.000		
	Jasa Tenaga Pelayanan Umum			Kecamatan Bunguran Timur				24	33.600.000	33.600.000		
	Pemeliharaan AC			Kecamatan Bunguran Timur				1	90.000.000	90.000.000		
4.01.01.2.05.06	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	4	692.580.000	692.580.000		Sekretariat Daerah
	Belanja pemeliharaan gedung kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	61.740.000	61.740.000		
	Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	30.000.000	25.000.000		
	Pemeliharaan gedung di sindit			Kecamatan Bunguran Timur				1	70.029.000	70.029.000		
	Pemeliharaan Gedung Dekonsentrasi			Kecamatan Bunguran Timur				1	50.020.000	50.020.000		
	Pemeliharaan Gedung Wartala			Kecamatan Bunguran Timur				1	30.508.000	30.508.000		
	Pemeliharaan Pagar Belakng Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				143	34.882.000	34.882.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PENGANGKUTAN	LOKASI	INDUKTOR KINERJA				PRODUK INDUKTIF	PRAKIRAAN MALU	JENIS PROG & KSG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB-KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Peningkatan tatanan Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				144	35.136.000	35.136.000		
	Pengadaan arsitek, tiling dan tulisan Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				205	50.020.000	50.020.000		
	Pengadaan Gedung Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				1	109.200.000	109.200.000		
	Pengadaan Landmark Kantor Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				145	35.380.000	35.380.000		
	Pengadaan Museum Bukit Arai			Kecamatan Bunguran Timur				1	50.506.000	50.506.000		
	Pelatihan Sarung RIT			Kecamatan Bunguran Timur				82	15.126.000	15.126.000		
4.01.01.2.1.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan kebutuhan	100	5.728.081.740	5.671.450.000		
4.01.01.2.1.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	1.717.466.000	1.717.466.000		Sekretariat Daerah
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kecamatan Bunguran Timur				2	1.717.466.000	1.717.466.000		
4.01.01.2.1.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	4.006.615.740	3.953.964.000		Sekretariat Daerah
	Belanja jasa akomodasi Tamu			Kabupaten Natuna				1	200.000.000	200.000.000		
	Belanja makan dan minum Jamuan Tamu kunjungan kerja inspeksi KDH WKDH			Kabupaten Natuna				7	700.000.000	700.000.000		
	Belanja makan dan minum jamuan tamu paguyuban operasional teknis Perangkat Daerah			Kabupaten Natuna				8	700.000.000	700.000.000		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRA M/ KEKUTAN/SUB KEKUTAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KED	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Belanja makan dan minum bahan			Kabupaten Netuna				1	249.984.000	249.984.000		
	Belanja Perjalanan Dinas Besa			Kabupaten Netuna				56	863.100.040	800.000.000		
	Belanja sewa kendaraan per kegiatan kunjungan KDH WKDH			Kabupaten Netuna				12	54.000.000	54.000.000		
	Honorium Tim Penasehat Bupati			Kecamatan Bunguran Timur				600	900.000.000	900.000.000		
	Perjalanan dinas luar daerah pihak ketiga			Kabupaten Netuna				36	338.522.700	350.000.000		
JUMLAH									49.085.069,462	61.366,473,122		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				RWGU INDIKATOR	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & REG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
02	Sekretariat Daerah								1,189,324,851	1,189,324,851		
02.01	<u>BAGIAN TATA PEMERINTAHAN</u>								1,189,324,851	1,189,324,851		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel		PENINGKATAN NILAI LPPO	100			1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	90	1,189,324,851	1,189,324,851		
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1	736,850,945	736,850,945		Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan			Kabupaten Natuna				1	736,850,945	736,850,945		
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1	382,473,906	382,473,906		Sekretariat Daerah
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			Kabupaten Natuna				1	382,473,906	382,473,906		
4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan	1	60,000,000	60,000,000		Sekretariat Daerah

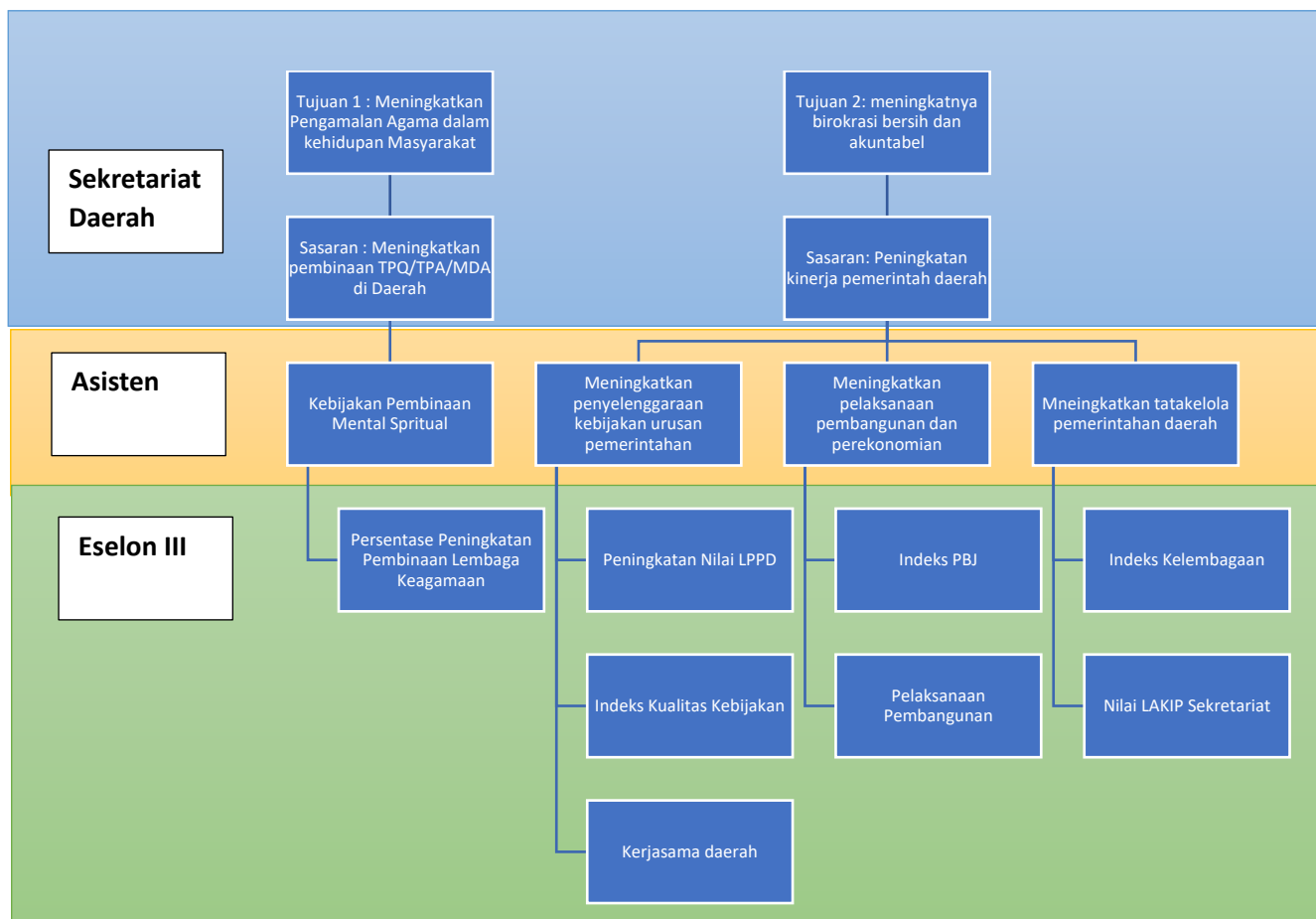
KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH
					PROGRAM/OUTCOME		KEGIATAN/SUB KEGIATAN/OUTPUT					
					URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Otonomi Daerah					
	Belanja Modal/Computer PC			Kecamatan Bunguran Timur				1	35.000.000	35.000.000		
	Belanja Modal/Display Monitor LCD			Kecamatan Bunguran Timur				1	25.000.000	25.000.000		
Jumlah									1.188.324.851	1.188.324.851		

4.2. Cascading dan Crosscutting

Cascading dan crosscutting merupakan dua konsep penting dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Keduanya saling berkaitan dan bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah sejalan dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah yang lebih luas.

Cascading merupakan proses penjabaran tujuan strategis dari tingkat atas (visi, misi, tujuan) ke tingkat yang lebih operasional (program dan kegiatan). Dengan kata lain, cascading adalah proses menerjemahkan tujuan besar menjadi tindakan nyata di lapangan.

Cascading Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna



Crosscutting merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai isu tematik atau lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Misalnya, isu gender, lingkungan hidup, atau pemberdayaan masyarakat dapat menjadi crosscutting issue yang perlu diperhatikan dalam setiap program. Untuk Sekretariat Daerah yang menjadi crosscutting isu adalah Pelaksanaan Birokrasi yang bersih dan akuntabel yang terintegrasai ke dalam tiga program yang ada di Sekretariat Daerah yaitu Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Program Perekonomian dan Pembangunan dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten. Untuk lebih jelas bagaimana crosscutting isu dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel Crosscutting Issu Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna

Tujuan Utama	Sasaran Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Program	Unit Penanggungjawab
Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Tatakelola Kelembagaan dan layanan administrasi pemerintahan Meningkatkan keterbukaan dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Organisasi, bagian umum , Bagian Humas
	Meningkatnya peneyrapan anggaran dan proyek infrastruktur ekonomi	Meningkatkan penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa dan Persentase Peneyrapan Anggaran dan Pelaksanaan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Bagian PBJ dan Bagian Adpmeb
	Meningkatnya penyelenggaraan Urusan pemerintahan	Meningkatkan capaian nilai LPPD, Meningkatkan kualitas kebijakan dan Memperluas kerjasama daerah dan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Tapem, Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama

BAB 5. PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025, merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. Dalam penutup dokumen Rencana Kerja tahun 2025 ini, kami menegaskan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan sebaik-baiknya. Rencana ini merupakan hasil dari proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Natuna.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan rencana kerja ini akan menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antar unit kerja dan stakeholder lainnya sangat diperlukan untuk memastikan setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan harapan. Dengan semangat kebersamaan, kami yakin bahwa semua tantangan dapat dihadapi dan diatasi secara efektif.

Selanjutnya, kami berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Natuna dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan rencana kerja ini. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keberhasilan rencana kerja ini sangat bergantung pada dukungan dan kerjasama dari semua pihak.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 harus dapat berfungsi sebagai :

- 1) Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 baik dalam lingkup program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 2) Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan bersama.
- 3) Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2025 ini. Semoga rencana ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna